

***THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, GOVERNMENT
INTERNAL CONTROL SYSTEMS, AND HUMAN RESOURCE COMPETENCIES
ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS
(EMPIRICAL STUDY ON REGIONAL APPARATUS ORGANISATIONS OF
BATANGHARI DISTRICT)***

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BATANGHARI)**

Siti Umami Khikmah¹, Achmad Hizazi², Yudi³

Prgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi^{1,2,3}
khikmahumams@gmail.com¹, hizazi@unja.ac.id², yudi.telanai@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of transparency, accountability, the government's internal control system, and human resource competency on the quality of local government financial reports. Quality financial reports can be influenced by several factors, namely transparency, accountability, the government's internal control system, and human resource competency. A quantitative approach using multiple linear regression analysis methods assisted by SPSS Version 29 for Windows in processing data was used in this research. Data collection is obtained through questionnaires or questionnaires. The population is all OPDs in Batanghari Regency. Sample selection used a purposive sampling method so that 82 samples were obtained. The research results show that transparency, accountability, the government's internal control system and human resource competency simultaneously influence the quality of local government financial reports. Partially transparency influences the quality of regional government financial reports, accountability influences the quality of regional government financial reports. Meanwhile, partially the government's internal control system has no effect on the quality of local government financial reports and human resource competency has no effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: *Transparency, Accountability, Government Internal Control System, Human Resource Competency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia. Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dibantu SPSS Versi 29 for Windows dalam mengolah data digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner atau angket. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 82 sampel. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia*

PENDAHULUAN

Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memerlukan

akuntabilitas dan transparansi dari masyarakat. Hal ini memaksa pemerintah, baik pusat maupun daerah,

untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan (Rohman et al., 2020). Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah mempunyai tujuan baik, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Firmansyah et al., 2022).

Laporan keuangan memenuhi kriteria kualitas jika relevan, dapat

Tabel 1. Opini BPK atas LHP LKPD Kabupaten Batanghari Tahun 2012-2022

Tahun Anggaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP -DPP	WTP -DPP	WDP	WTP							

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Dari tabel 1. terlihat bahwa Kabupaten Batanghari telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut. Namun Atmaja & Probohudono, (2015) berpendapat bahwa mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tidak dapat menjamin laporan keuangan bebas dari temuan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut biasanya berkaitan dengan kelemahan pada sistem pengendalian internal dan kelemahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Yuditiya et al., 2023).

Permasalahan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD tahun 2020 yaitu terkait penganggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Batanghari tidak berdasarkan perkiraan terukur dan dapat dicapai dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta belanja daerah tidak didasarkan pada kemampuan keuangan daerah. Misalnya seperti Pajak Reklame dan Pajak Parkir yang realisasinya melebihi anggaran. Serta Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet

diandalkan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut ini merupakan opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada LKPD Kabupaten Batanghari:

yang realisasinya belum mencapai anggaran (LHP Atas LKPD Kabupaten Batanghari, 2020).

Ketidak patuhan atas pemeriksaan LKPD tahun 2021 antara lain realisasi belanja atas kegiatan tahun 2020 sebesar Rp13.154.608.179 tidak diakui sebagai kewajiban Tahun Anggaran 2020 namun dibayarkan dan dibebankan pada tahun 2021. Realisasi belanja tersebut tidak dicatat sebagai utang per 31 Desember 2020 sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, kondisi ini salah satunya tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I.13 pernyataan nomor 12 laporan operasional, paragraf 32. Permasalahan ini menyebabkan lebih saji beban pada laporan operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.154.608.179 dan pengeluaran berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan belanja tahun 2021 (LHP Atas LKPD Kabupaten Batanghari, 2021).

Permasalahan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD tahun 2022 yaitu pengenaan denda keterlambatan pada kontrak dan perubahannya tidak sesuai ketentuan serta terlambatnya

penyelesaian pekerjaan pada Dinas PUPR yang belum dikenakan sanksi denda Rp8.044.198.000 mengakibatkan kekurangan penerimaan atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari 59 paket kontrak yang dibiayai pinjaman daerah, ada sebanyak 11 paket kontrak pada Dinas PUPR yang penyelesaiannya terlambat, namun belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf (f). (LHP Atas LKPD Kabupaten Batanghari, 2022).

Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya: penelitian oleh Kurniawati dan Sadeli, (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Laksono, (2023) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ariada dan Darmawan, (2023) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aldino et al., (2022) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan pengaruh secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan informasi bagi pemerintah khususnya di Kabupaten Batanghari dalam hal menilai kualitas laporan keuangan berdasarkan variabel dalam model penelitian ini.

informasi kepada pengguna informasi laporan keuangan sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan terkait ekonomi, sosial, maupun politik dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui wakilnya. Teori keagenan pada pemerintah demokrasi yaitu hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah (Wulan D, dkk 2020).

Teori keagenan dalam organisasi sektor publik menjelaskan bahwa pemerintah selaku pemegang amanah sebagai agen bertanggung jawab dalam memberikan pertanggung jawaban, pelaporan serta pengungkapan seluruh aktivitas yang dilakukan mereka. Seperti memantau sumber keuangan terhadap pihak yang memberi amanah (masyarakat) sebagai prinsipal yang

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Jansen & Meckling, (1976) menyatakan Hubungan keagenan adalah suatu pengaturan kontraktual dimana satu atau lebih individu (prinsipal) memberikan wewenang kepada individu lain (agen) untuk melakukan berbagai layanan atas nama prinsipal dan memungkinkan agen untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal.

Dapat pula diartikan bahwa agen menerima instruksi dari prinsipal untuk menyelesaikan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Teori keagenan telah dilaksanakan, termasuk pemerintah daerah dalam menciptakan transparansi akuntabilitas publik. Pelaporan keuangan dilakukan oleh pemerintah yang kapasitasnya sebagai agen berkewajiban untuk menyampaikan

berhak untuk meminta tanggungjawab tersebut (Zubaidah & Nugraeni, 2023).

Transparansi

Transparansi (*Transparency*) adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi keuangan yang jelas dan benar, hal ini karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan apakah pemerintah mematuhi persyaratan hukum atau tidak (Erlina et al., 2015).

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengacu pada tugas pemerintah (agent) untuk menginformasikan kepada publik (principal), yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk menuntut akuntabilitas, tentang semua kegiatan dan keputusan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas adalah tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sektor publik harus lebih menekankan tanggung jawab horizontal bukan hanya tanggung jawab secara vertikal untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, pengendalian internal adalah suatu proses terpadu tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh seluruh anggota staf dan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui pelaporan keuangan, kepemimpinan yang efektif dan operasi yang efisien, perlindungan negara. aset, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah *output* dari suatu sistem akuntansi yang berguna untuk menginformasikan pihak-pihak yang akan memanfaatkan informasi keuangan tersebut sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyampaian data keuangan serta instrumen evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan (Rohman et al., 2020). Laporan keuangan yang berkualitas membantu stakeholders dalam membuat keputusan supaya keputusan yang diambil dapat lebih berkualitas (AgustiningTyas et al., 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat karakteristik laporan keuangan yang berkualitas:

1. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan jika data yang dikandungnya berpotensi mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam menilai peristiwa saat ini atau sebelumnya, meramalkan masa depan, dan memvalidasi atau merevisi pandangan mereka sebelumnya.

2. Andal

Data laporan keuangan disajikan secara faktual, bebas dari ketidakakuratan signifikan dan interpretasi yang menyesatkan, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dipahami

Isi laporan keuangan disajikan dengan kosakata atau istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, sehingga pengguna dapat memahaminya

4. Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan informasi

organisasi lain atau periode sebelumnya.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi pemerintah mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan keuangan daerah yang dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Rifandi, 2019). Transparansi merupakan salah satu ciri kualitas dan keandalan pelaporan keuangan serta penyajian yang jujur. Maka transparansi berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Rifandi, (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Tahir et al., (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Transparansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas bertujuan untuk mengatur dan mengelola pendapatan perangkat daerah supaya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik, dengan adanya akuntabilitas pada perangkat daerah bermaksud memperkuat sistem dan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akuntabilitas publik memungkinkan masyarakat untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dengan demikian,

akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah (Vidyasari, 2021).

Ferlia et al., (2023) dari hasil penelitiannya menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan peraturan yang ada dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laksono, (2023) menyatakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas. Peningkatan kualitas laporan keuangan akan dipengaruhi oleh peningkatan akuntabilitas. Tahir et al., (2021) menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan SPIP yaitu memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, seperti keandalan laporan keuangan, penggunaan aset negara dan ketaatan pada perundang-undangan. Pemerintah daerah Kabupaten Batanghari akan memperoleh manfaat dengan adanya sistem pengendalian internal yang akan menjamin kejelasan rencana pembangunan yang telah disepakati sehingga APBD dapat dikelola di bawah pengawasan masing-masing setiap OPD. Serta dapat meminimalisir perilaku kecurangan yang

mungkin dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan yang tidak bertanggung jawab.

Hamruna dkk., (2022) menyatakan adanya sistem pengendalian intern memungkinkan pemerintah bertindak sebagai agen yang diberi wewenang oleh prinsipal (masyarakat), dan diharapkan dengan sistem ini pemerintah dapat mengambil keputusan yang terbaik dan meminimalisir pelanggaran. Sistem pengendalian intern digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggungjawab kegiatan sehingga dituntut bekerja secara objektif supaya hal-hal yang menurunkan kualitas laporan keuangan dapat dihindari (Annisa, 2023).

Imran, (2022) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Baubau. Jika sistem pengendalian internal cukup baik, karyawan akan cenderung bekerja secara efisien dan produktif. Hal ini akan membantu laporan keuangan perusahaan menjadi lebih akurat. Penelitian Rohman et al., (2020) menyatakan bahwa Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian intern, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₃: SPIP Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

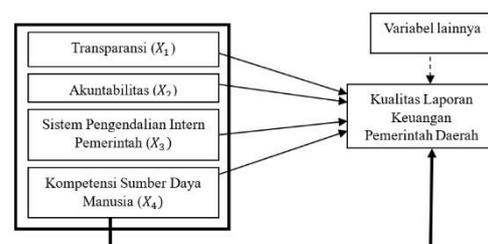
Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang sangat penting dan

peran serta fungsinya tidak dapat ditiru oleh sumber daya lain. Sumber daya manusia adalah indikator yang sangat diperlukan dalam organisasi dan menjadi salah satu faktor penentu efektivitas operasional dalam organisasi. Pebriani, (2019) menyatakan pengelolaan keuangan daerah yang baik memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan sehingga sumber daya manusia yang kompeten dapat menerapkan sistem akuntansi dan memahami logika akuntansi.

Rohman et al., (2020) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang dilatih dan memiliki kemampuan lebih mengetahui laporan keuangan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Aldino et al., (2022) memperoleh hasil yang sama bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Padang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₄: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Batanghari. Jenis data berupa data primer menggunakan angket atau kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner secara langsung pada setiap OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier

berganda, dan uji hipotesis terdiri dari uji f, uji t, dan koefisien determinasi (R^2).

Terdapat empat variabel independen dalam penelitian ini, yaitu transparansi, akuntabilitas, SPIP dan kompetensi sumber daya manusia. Serta menggunakan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Berikut ada definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Skala
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan	Interval
	2. Andal	
	3. Dapat dibandingkan	
	4. Dapat dipahami (Saputra et al., 2020)	
Transparansi (X_1)	1. Informatif	Interval
	2. Keterbukaan	
	3. Pengungkapan (Astuti, 2023)	
Akuntabilitas (X_2)	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Interval
	2. Akuntabilitas Proses	
	3. Akuntabilitas Program	
	4. Akuntabilitas Kebijakan (Astuti, 2023)	
SPIP (X_3)	1. Lingkungan Pengendalian	Interval
	2. Penilaian Risiko	
	3. Kegiatan pengendalian	
	4. Informasi dan Komunikasi	
	5. Pengawasan/Pemantauan (Saputra et al., 2020)	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_4)	1. Pengetahuan	Interval
	2. Keterampilan	
	3. Sikap (Hidayakh et al., 2020)	

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari yang berjumlah 28 OPD. Penarikan sampel diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria;

pegawai yang menjabat bagian Kepala OPD, Kasubag Keuangan, dan Staff Subbag Keuangan; dengan minimal masa kerja selama setahun. Pemilihan kriteria pegawai tersebut karena pegawai bagian keuangan adalah bagian terpenting dalam penyusunan laporan

keuangan, sehingga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipresentasikan oleh bagian keuangan. Sehingga diperoleh sampel penelitian berjumlah 82 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL TRANS	82	19.00	35.00	27.8659	3.49872
TOTAL AKUN	82	30.00	40.00	34.7195	3.04807
TOTAL SPIP	82	45.00	60.00	51.7195	4.49217
TOTAL KSDM	82	34.00	45.00	39.5244	3.63191
TOTAL KLK	82	45.00	60.00	52.1220	4.23212
Valid N (listwise)	82				

Sumber: *Output SPSS* Versi 29, 2024

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa jumlah data penelitian sebanyak 82 data. Variabel transparansi (X_1) diketahui nilai terendah dari jawaban responden adalah 19, nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 35 dengan nilai rata-rata (*mean*) adalah 27,866 dan nilai standar deviasi yaitu 3,499. Variabel akuntabilitas (X_2) dapat diketahui nilai terendah yaitu 30 dan nilai tertinggi yaitu 40 dengan nilai rata-rata (*mean*) yaitu 34,719 dan nilai standar deviasi yaitu 3,048. Variabel SPIP (X_3) diketahui nilai terendah yaitu 45 dan nilai tertinggi yaitu 60 dengan rata-rata (*mean*) yaitu 51,719 dan nilai standar deviasi nya yaitu 4,492. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X_4) diketahui nilai terendah yaitu 34 dan nilai tertinggi yaitu 45 dengan nilai rata-rata (*mean*) yaitu 39,524 dan nilai standar deviasi sebesar 3,632. Variabel kualitas laporan keuangan (Y) memiliki nilai terendah sebesar 45, nilai tertinggi sebesar 60 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 52,122 dan nilai standar deviasi sebesar 4,232.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas,

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 menunjukkan lebih besar dari 0,05 ($0,2 > 0,05$) maka data residual berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas didapat nilai *tolerance* lebih dari 0,1 (nilai *tolerance* $> 0,1$) dengan nilai VIF semua variabel kurang dari 10 (nilai VIF < 10) maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* diperoleh nilai signifikansi dari setiap variabel nilainya melebihi nilai alpha ($\alpha = 5\%$) maka tidak terjadi tanda heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	f	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.902	3.437		3.754		<.001
	TRANS	.278	.103	.230	2.707		.008
	AKUN	.924	.228	.666	4.059		<.001
	SPIP	-.147	.151	-.156	-.970		.335
	KSDM	.176	.128	.151	1.382		.171
	Regression					36.460	<.001
	Adjusted R Square					.637	

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: *Output SPSS Versi 29, 2024*

Dari Tabel 4. di atas jika dijadikan model linier berganda dalam penelitian ini yaitu

Sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Trans} + \beta_2 \text{Akun} + \beta_3 \text{SPIP} + \beta_4 \text{KSDM} + e$$

$$\text{KLK} = 12,902 + 0,278\text{TRANS} + 0,924\text{AKUN} - 0,147\text{SPIP} + 0,176\text{KSDM} + e$$

Keterangan:

KLK (Y) = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

TRANS (X_1) = Transparansi

AKUN (X_2) = Akuntabilitas

SPIP (X_3) = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KSDM (X_4) = Kompetensi Sumber Daya Manusia

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

e = Standar *Error*

Persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut: a). Jika transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia diperhitungkan, maka nilai konstanta sebesar 12,902 menunjukkan kualitas pelaporan keuangan sebesar 12,902. b). Dengan nilai koefisien transparansi sebesar 0,278 maka variabel kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,278 setiap kenaikan satu satuan pada variabel transparansi. c). Nilai koefisien akuntabilitas sebesar 0,924 berarti ketika variabel akuntabilitas naik sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan meningkat

sebesar 0,924. d). Nilai koefisien SPIP sebesar -0,147 berarti jika variabel SPIP terjadi kenaikan 1 satuan maka variabel kualitas laporan keuangan akan menurun sebesar 0,147 begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan variabel SPIP 1 satuan maka terjadi kenaikan sebanyak 0,147. e). Koefisien kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,176 berarti jika variabel kompetensi SDM terjadi kenaikan sebanyak 1 satuan maka terjadi kenaikan sebesar 0,176 pada variabel kualitas laporan keuangan.

Uji Hipotesis

Uji t

Hasil analisis uji pada Tabel 4. yaitu variabel transparansi dan akuntabilitas berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut karena variabel transparansi mempunyai nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $2,707 > 1,991$. Serta hasil signifikansi $0,008 < 0,05$. Variabel akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $4,059 > 1,991$ hasil signifikansi $0,001 < 0,05$. Sedangkan variabel SPIP memiliki nilai t_{hitung} $-0,970 < t_{tabel}$ $1,991$ dengan signifikansi $0,335 > 0,05$ sehingga SPIP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel kompetensi SDM memiliki nilai t_{hitung} $1,382 <$

t_{tabel} 1,991 dengan signifikansi 0,171 > 0,05 maka kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji F

Hasil uji pada Tabel 4. nilai F_{tabel} sebesar 2,50 diperoleh dari df_1 ($df = k = 4$) dan $df_2 = n - k - 1 = 82 - 4 - 2 = 77$) diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah 36,460 > 2,50 dan hasil dari signifikansi 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 4. di atas, diketahui nilai *Adjusted R Square* 0,637 dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 63,7% dan sisa sebesar 36,3% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), sistem pengendalian intern pemerintah (X_3), dan kompetensi sumber daya manusia (X_4) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil uji simultan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama.

Pengujian hipotesis (H_1) memperoleh hasil bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal tersebut dibuktikan pada uji F (simultan) dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan nilai F_{hitung} 36,460 > F_{tabel} 2,50. Pada koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 63,7% artinya sebesar 63,7% variabel transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh untuk keberhasilan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Batanghari. Hal ini menunjukkan jika transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga semakin tinggi begitupun sebaliknya.

Sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa dalam organisasi sektor publik di mana pemerintah sebagai pemegang amanah atau agen harus mempertanggung jawabkan, membuat pelaporan serta pengungkapan seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah. Wulan D dkk., (2020) menyatakan teori keagenan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan transparansi akuntabilitas publik. Yuditiya dkk., (2023) menyatakan bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan cara transparansi penggunaan sumber keuangan. Gibsi Ompusunggu dan Valiant Salomo, (2019) menyatakan pengendalian intern dimaksudkan untuk membantu organisasi mencapai tujuan dalam mengidentifikasi dan mencegah *fraud* serta melindungi sumber daya organisasi baik berwujud maupun tidak berwujud melalui proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi.

Sejalan dengan penelitian Hamsinar, (2022), Ferlia dkk., (2023), Laksono, (2023), Ariada dan Darmawan, (2023) dan Yuditia dkk., (2023) menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis kedua untuk mengetahui apakah transparansi secara parsial mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji parsial variabel transparansi dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel transparansi (X_1) memiliki nilai t sebesar 2,707 dengan signifikansi 0,008. Nilai signifikansi $0,008 < 0,05$, t_{tabel} dengan rumus $t = (\alpha/2; n-k-1)$ sehingga t_{tabel} diperoleh 1,991. Jadi nilai $t_{hitung} (2,707) > t_{tabel} (1,991)$. Maka hipotesis kedua (H_2) diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin transparan informasi keuangan pemerintah daerah akan semakin berkualitas laporan keuangannya.

Data jawaban responden menunjukkan bahwa dengan adanya pemberian informasi anggaran kepada publik, laporan keuangan yang tepat waktu, dan adanya sistem penyampaian informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan memperoleh skor di atas rata-rata. Walaupun masih adanya kelemahan yaitu masih terdapat kesulitan dalam mengakses informasi anggaran. Sehingga hal ini tidak mempengaruhi bahwa pengelolaan

keuangan di Kabupaten Batanghari telah transparan.

Sejalan dengan penelitian Hamsinar, (2022), Kurniawati dan Sadeli, (2021), Maulana dan Lubis, (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu teori yang memperkuat hasil penelitian ini yaitu teori agensi yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan dilakukan oleh pemerintah yang kapasitasnya sebagai agen berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada pengguna informasi laporan keuangan (Wulan D dkk., 2020). Transparansi Kabupaten Batanghari salah satunya dapat dilihat secara online pada web batanghari.co.id yang menyajikan informasi terkait laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir, daftar OPD, daftar kecamatan, dan lain sebagainya.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga untuk mengetahui apakah variabel akuntabilitas secara parsial dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji parsial variabel akuntabilitas dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa variabel akuntabilitas (X_2) memiliki nilai t sebesar 4,059 dengan signifikansi 0,001. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan t_{tabel} menggunakan rumus $t = (\alpha/2; n-k-1)$ sehingga t_{tabel} diperoleh 1,991. Jadi nilai $t_{hitung} (4,059) > t_{tabel} 1,991$ dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin

terlaksananya akuntabilitas dengan baik maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan jawaban responden yang sebagian besar menyatakan bahwa APBD dipantau secara terus menerus, pengawasan APBD dilakukan secara berkelanjutan, semua aparatur dan pemimpin harus memahami anggaran untuk suatu program yang jelas, menganalisis keuangan serta mencantumkan setiap informasi dalam nota perhitungan. Melalui hal-hal tersebut terlihat aparatur pemerintah daerah Kabupaten Batanghari telah menerapkan akuntabilitas laporan keuangan daerah dengan baik. Menurut Vidyasari, (2021) adanya akuntabilitas publik memungkinkan masyarakat untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan penelitian Ferliadkk., (2023), Laksono, (2023), Kurniawati dan Sadeli, (2021) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini sesuai dengan teori keagenan bahwa pemerintah selaku pemegang amanah sebagai agen bertanggung jawab dalam memberikan pertanggungjawaban, pelaporan serta pengungkapan seluruh aktivitas yang dilakukan mereka dan masyarakat berhak meminta tanggung jawab tersebut (Zubaidah dan Nugraeni, 2023).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis keempat untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Uji parsial variabel SPIP untuk menjawab rumusan masalah yang keempat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa variabel SPIP (X_3) memiliki nilai t sebesar $-0,970$ dengan signifikansi $0,335$. Signifikansi $0,335 > 0,05$ berarti hipotesis keempat (H_4) ditolak, artinya SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian nilai t_{tabel} dengan rumus $t = (\alpha/2; n-k-1)$ sehingga t_{tabel} diperoleh $1,991$. Jadi nilai $t_{hitung} (-0,970) < t_{tabel} (1,991)$ sehingga SPIP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial, tidak ada pengaruh secara signifikan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil jawaban responden hampir seluruhnya menyatakan penerapan SPIP setiap komponen telah dilaksanakan. Berdasarkan data rekap jawaban responden di Kabupaten Batanghari terlihat bahwa terdapat OPD yang struktur organisasinya tidak lengkap seperti tidak adanya kepala OPD, dan tidak adanya kasubag keuangan sehingga hal ini dapat memunculkan pegawai melaksanakan tugas yang berbeda dalam waktu bersamaan. Sehingga penerapan SPIP tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena penerapannya yang belum optimal.

Saputra et al., (2020) menyatakan bahwa SPI merupakan faktor penting sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena SPI mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

serta mendorong efisiensi dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Parinding et al., (2023) bahwa SPIP tidak berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Karena meskipun penerapan SPIP di SKPD terkait telah mematuhi persyaratan hukum, masih terdapat sejumlah ketidakpatuhan, seperti banyaknya pegawai yang melakukan banyak tugas dan masih mengabaikan keamanan aset fisik. Serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya didasarkan pada efisiensi pengendalian internalnya saja.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kelima untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Uji parsial variabel kompetensi sumber daya manusia untuk menjawab rumusan masalah yang kelima.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa variabel kompetensi SDM (X_4) memiliki nilai t sebesar 1,382 dengan signifikansi 0,171. Nilai signifikansi $0,171 > 0,05$ berarti hipotesis kelima (H_5) ditolak, artinya kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian nilai t_{tabel} dengan rumus $t = (\alpha/2; n-k-1)$ sehingga t_{tabel} diperoleh 1,991 dan nilai t_{hitung} ($1,382$) $< t_{tabel}$ ($1,991$) sehingga kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial, tidak ada pengaruh secara signifikan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil jawaban responden hampir seluruhnya menyatakan bahwa telah mendapatkan diklat atau pelatihan, memahami tugasnya dalam pengelolaan keuangan, memahami dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor 8 Tahun 2006, dan menjalankan etika dalam melaksanakan pekerjaannya. Di Kabupaten Batanghari, semua OPD rutin mengikuti diklat mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta kebijakan atau peraturan perundang-undangan terbaru terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Walaupun pegawai OPD di Kabupaten Batanghari berlatar pendidikan akuntansi hanya sedikit, namun tidak menjadi tolak ukur sepenuhnya dalam menilai kompetensi seseorang. Karena semua pegawai terkhusus bagian keuangan rutin dalam mengikuti pelatihan atau diklat terkait penyusunan LKPD. Sehingga baik lulusan akuntansi atau bukan semua pegawai dianggap memiliki kemampuan yang sama.

PENUTUP KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi (X_1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia (X_4) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas cakupan sampel dan menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Aldino, H. P., Annisa, A., & Zulvia, D. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Internal Audit, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 116–126. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3606>
- Annisa, L. C. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen). *Skripsi Akuntansi Syariah*.
- Ariada, M., & Darmawan, N. A. S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(02), 226–237. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.61413>
- Astuti, N. K. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Klaten). *Skripsi Akuntansi Syariah*.
- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Tim Editor Salemba Empat Yogyakarta (Ed.)). Salemba Empat.
- Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Hamsinar. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan

- Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)*, 3(4), 85–90. <https://doi.org/10.37251/jpail.v3i4.640>
- Hidayakh, E., Rahayu, S., & Gowon, M. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 80–89. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10258>
- Imran, M. (2022). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 165–174. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i2.232>
- Kurniawati, A., & Sadeli, D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 2(2), 18–24. <https://doi.org/10.23969/brainy.v2i2.41>
- Laksono, R. G. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Jember. *Economics and Business UBS*, 12(5), 3155–3170.
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2020.* (n.d.). Badan Pemeriksa Keuangan. <https://eppid.bpk.go.id>
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2021.* (n.d.). Badan Pemeriksa Keuangan. <https://eppid.bpk.go.id>
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2022.* (n.d.). Badan Pemeriksa Keuangan. <https://eppid.bpk.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (Ed.)). ANDI.
- Maulana, Z., & Lubis, N. K. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 1–14.
- Parinding, S., Sari, N., & Dasila, R. A. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jab.v16i1.4198>
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55–62. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v10i1.744>
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*

- Tirtayasa*, 4(1), 1–17.
<https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.4505>
- Rohman, A., Hasanudin, A. I., & Lestari, T. (2020). Peran Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 5(2), 152–165.
<https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v5i2.8995>
- Saputra, F., Rahayu, S., & Yudi. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4), 368–279.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 20–29.
<https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Wulan D, A., Yudi, Y., & Friyani, R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 1–19.
<https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10941>
- Yuditiya, A. I., Rahayu, S., & Tiswiyanti, W. (2023). Kompetensi SDM , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi : Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 197–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.12253>
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 978–988.